

Analisis Keuangan Inklusif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Wiling Alih Maha Ratri¹

¹Badan Pusat Statistik, Pasaman Barat, Indonesia. Email: wiling@bps.go.id

Artikel Diterima: (20 September 2021)

Artikel Direvisi: (10 November 2021)

Artikel Disetujui: (18 November 2021)

ABSTRACT

Affordable access to financial services is a driving force for the development of the financial industry, which in turn encourages the growth of the real sector. This study aims to measure the affordability of access to financial services through the regency/municipality Index of Financial Inclusion (IFI) in West Sumatra Province in 2020 using the concept developed by Sarma (2012). Three dimensions used to measure IFI are banking penetration, availability of banking services, and use of banking services. Then descriptive analysis was carried out to evaluate the results of the IKI measurement. The results of the IFI measurement show that the average IFI of regency/municipality in West Sumatra is 0.35, including in the medium category, where Solok Municipality has the highest IFI among other the regencies/municipalities, at 0.96, followed by Bukittinggi and Payakumbuh, are 0.82 and 0.58, respectively. In general, the level of financial inclusion in areas with municipality status is higher than in regency, because, in a municipality area, people have easier access to financial services. IFI can be improved by educating the public about banking products, developing branchless banking to remote areas, and providing easily accessible credit.

Keywords: Financial Intermediation, Financial Service, Financial Inclusion

ABSTRAK

Akses layanan keuangan yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan pendorong perkembangan industri keuangan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor riil. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur keterjangkauan akses layanan keuangan tersebut melalui Indeks Keuangan Inklusif (IKI) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Perhitungan IKI dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang dikembangkan oleh Sarma (2012), dimana terdapat 3 (tiga) dimensi dalam pengukuran IKI yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan jasa perbankan. Kemudian analisis deskriptif dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengukuran IKI. Hasil pengukuran IKI menunjukkan bahwa rata-rata IKI kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 0,35, termasuk dalam kategori sedang, dimana Kota Solok memiliki IKI tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya, sebesar 0,96, disusul oleh Kota Bukittinggi dan Payakumbuh, masing-masing sebesar 0,82 dan 0,58. Secara umum tingkat inklusifitas keuangan di daerah yang berstatus kota lebih tinggi dari kabupaten, karena di daerah yang berstatus kota, masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan. Peningkatan IKI dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk perbankan, mengembangkan *branchless banking* sampai ke daerah terpencil, dan menyediakan kredit yang mudah diakses.

Kata Kunci: Intermediasi Keuangan, Jasa Keuangan, Keuangan Inklusif

Pendahuluan

Sektor keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena sektor keuangan merupakan penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan menjadi penggerak pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Selain sebagai sumber pembiayaan, sektor keuangan juga berperan sebagai sarana bagi masyarakat dalam melakukan investasi dan penyelenggara industri jasa keuangan dalam

Penulis Koresponden:

Nama : Wiling Alih Maha Ratri

Email : wiling@bps.go.id

menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Perkembangan industri keuangan belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, agar masyarakat luas dapat terlibat dalam sistem perekonomian, akses layanan jasa keuangan tersebut harus dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau merupakan pencerminan keuangan inklusif. Keuangan inklusif merupakan kondisi ketika penduduk dewasa dapat mengakses dan menggunakan berbagai macam layanan keuangan formal secara efektif (Kunt, Klapper, & Singer 2017).

Untuk mendukung pengembangan keuangan inklusif, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (PP) nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah. Capaian SNKI diukur melalui Indeks Keuangan Inklusif (IKI), dengan indikatornya minimal persentase penduduk dewasa yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal. Berdasarkan hasil Survei Nasional dan Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks keuangan inklusif Indonesia meningkat dari 67,8% pada tahun 2016 menjadi 76,2% pada tahun 2019 (OJK, 2019). Sedangkan berdasarkan data *Financial Inclusion Insights (FII)*, kepemilikan rekening bank di Indonesia meningkat dari 35,1% pada tahun 2016 menjadi 55,7% pada tahun 2018. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas SNKI tanggal 28 Januari 2020, target keuangan inklusif Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 90%.

Studi terkait keuangan inklusif telah dilakukan oleh para peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Sarma (2012) melakukan studi terkait metode pengukuran indeks keuangan inklusif. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya keuangan inklusif yang telah diakui secara luas, tetapi belum terdapat literatur yang komprehensif yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana inklusi keuangan di seluruh ekonomi. Makalah tersebut mencoba mengisi kesenjangan ini dengan mengusulkan metode pengukuran indeks inklusi keuangan. Indeks yang diusulkan menangkap informasi tentang berbagai dimensi keuangan yang bernilai antara 0 dan 1, di mana nilai IKI=1 menunjukkan suatu negara memiliki kondisi inklusi keuangan terbaik di antara negara lain. Sedangkan nilai IKI=0 menunjukkan negara tersebut memiliki kondisi inklusi keuangan paling buruk. Tingkat inklusi keuangan semakin baik jika nilai indeks inklusi keuangan mendekati 1.

Dimensi keuangan yang digunakan untuk mengukur IKI antara lain dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan jasa perbankan. Indeks inklusi keuangan dapat dihitung jika masing-masing dimensi telah dihitung nilai indeks dimensi. Semakin tinggi nilai indeks suatu dimensi, semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut. Misalkan, semakin tinggi indeks dimensi ketersediaan suatu negara, semakin tinggi pula jumlah bank yang dapat dijangkau masyarakat di negara tersebut. Untuk menghitung indeks setiap dimensi memerlukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi inklusi keuangan.

Piñeyro (2013) melakukan pengukuran indeks tingkat akses dan penggunaan jasa keuangan, edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan pembangunan sosial kota-kota di Meksiko. Seluruh kota diranking menurut hierarki tingkat inklusi dengan analisis *cluster*. Hasilnya 36% kota di Meksiko memiliki tingkat inklusi keuangan tinggi, sedangkan 29% kota memiliki tingkat inklusi keuangan rendah. Kota-kota dengan penduduk berpendidikan lebih tinggi dan pendapatan lebih besar mendapat manfaat yang lebih besar dari layanan lembaga keuangan.

Cámara & Tuesta (2014) mengukur tingkat inklusi keuangan di 82 negara maju dan kurang berkembang menggunakan informasi sisi permintaan dan penawaran jasa keuangan. Dimana tingkat inklusi keuangan ditentukan oleh tiga dimensi yaitu penggunaan, hambatan, dan akses ke layanan keuangan formal, dengan metode Analisis Komponen Utama dua tahap. Tahap pertama menghitung bobot untuk masing-masing dimensi, dan tahap kedua menghitung tingkat keuangan inklusif. Hasilnya, dimensi akses merupakan dimensi yang paling memengaruhi keuangan inklusif. Negara-negara maju memiliki tingkat inklusifitas keuangan yang lebih tinggi dari negara kurang berkembang.

Ummah, Nuryartono, & Anggraeni (2014) melakukan penelitian mengenai inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2007-2011. Penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat akses dan penggunaan jasa keuangan lintas provinsi di Indonesia dengan IKI, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan dengan regresi panel tobit, dan menggambarkan hubungan antara inklusi keuangan dan distribusi pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong rendah. Besar kecilnya perekonomian dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat inklusi keuangan. Berlawanan dengan hipotesis penelitian, melebarinya ketimpangan pendapatan menyebabkan inklusi keuangan yang lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, jumlah pengguna telepon seluler dan internet berpengaruh positif terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah, ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya.

Metode pengukuran keuangan inklusif dengan menggunakan metode Sarma (2012) juga dilakukan oleh Atikah & Ma'ruf (2016) terhadap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasilnya semua kabupaten/kota di DIY mempunyai tingkat IKI yang rendah kecuali kota Yogyakarta. Azwar (2017) juga melakukan pengukuran IKI menggunakan metode Sarma (2012) untuk mengukur inklusivitas keuangan syariah pada 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya indeks inklusifitas keuangan syariah di Indonesia secara umum tergolong rendah dengan *average value* sebesar 0,127. Pada tingkat provinsi, ditemukan bahwa Provinsi Bangka Belitung memiliki indeks inklusifitas tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Keuangan inklusif berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan kemiskinan (Adriani dan Wiksuana 2018). Memperhatikan pentingnya keuangan inklusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penelitian terkait inklusifitas keuangan perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis indeks keuangan inklusif antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan metode yang dikembangkan oleh Sarma (2012). Penelitian ini mengkategorikan

kabupaten/kota berdasarkan IKI dan dimensi penyusunnya sehingga dapat diketahui kabupaten/kota yang memiliki inklusifitas keuangan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan adanya pengkategorian tersebut akan dapat diberikan rekomendasi kebijakan untuk kabupaten/kota yang memiliki inklusifitas rendah maupun sedang. Penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada evaluasi nilai IKI serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat inklusivitas keuangan. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya mengevaluasi nilai IKI, tetapi juga mengevaluasi nilai dimensi-dimensi penyusun IKI (penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan jasa perbankan). Karena untuk mengetahui dimensi apa yang paling menyebabkan tinggi atau rendahnya nilai IKI diperlukan evaluasi dimensi-dimensi penyusunnya agar dapat diketahui rekomendasi kebijakan yang tepat dari sisi dimensi tersebut.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan data *cross section* kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2020, berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Data jumlah penduduk, jumlah kantor cabang bank umum, dan PDRB tahun 2020 berasal dari publikasi BPS Sumatera Barat, yaitu Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021. Sedangkan untuk variabel jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK), jumlah DPK dan kredit tahun 2020 menggunakan data BI yaitu Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, Provinsi Sumatera Barat periode Desember 2020.

Perhitungan IKI dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dikembangkan oleh Sarma (2012). Indeks inklusi keuangan ini mencakup tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan jasa perbankan. Dimensi penetrasi perbankan menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan. Indikator yang menggambarkan dimensi ini adalah jumlah rekening deposit. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk dimensi penetrasi perbankan adalah jumlah rekening Dana Pihak Ketiga di bank umum di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dibagi dengan jumlah populasi dewasa di kabupaten/kota tersebut.

Dimensi kedua dari inklusi keuangan adalah ketersediaan jasa perbankan yang menggambarkan jangkauan perbankan kepada masyarakat. Indikator yang menggambarkan dimensi ini dapat berupa outlet dari perbankan, misalkan jumlah kantor cabang atau ATM yang tersebar di suatu wilayah. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk dimensi ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah kantor cabang bank umum di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan jumlah populasi dewasa di kabupaten/kota tersebut.

Dimensi ketiga dari inklusi keuangan adalah kegunaan jasa perbankan yang menggambarkan manfaat jasa perbankan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan dimensi ini dapat berupa jumlah tabungan, kredit, remitansi, asuransi, dan jasa lainnya yang ditawarkan oleh perbankan. Namun, untuk mempermudah dalam perhitungan, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah DPK dan kredit yang disalurkan bank umum di setiap kabupaten/kota dibagi dengan PDRB kabupaten/kota.

Indeks dari setiap dimensi, d_i dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}; i = 1, 2, 3 \dots \dots \dots (1)$$

dimana:

- w_i = bobot untuk dimensi i, $0 \leq w_i \leq 1$
- A_i = nilai terkini dari peubah i
- m_i = nilai minimum (batas bawah) dari peubah i
- M_i = nilai maksimum (batas atas) dari peubah i

Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat memengaruhi inklusi keuangan. Dalam penelitian ini, seluruh dimensi diamsusikan memiliki peranan yang sama penting dalam menentukan tingkat inklusi keuangan, sehingga masing-masing dimensi memiliki bobot sebesar 1. Batas bawah atau nilai minimum (m_i) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan batas atas atau nilai maksimum (M_i) setiap variabel, ditentukan oleh sebaran masing-masing indikator.

Tabel 1. Indikator untuk Pengukuran IKI

Dimensi (d_i)	Bobot	Batas Bawah	Batas Atas
Penetrasi Perbankan (d_p)	1	0	9,90604140
Ketersediaan Jasa Keuangan (d_a)	1	0	0,00060002
Kegunaan Jasa Perbankan (d_u)	1	0	0,92152033

Sumber: BI dan BPS, 2020 (data diolah)

Persamaan (1) akan menghasilkan nilai $0 < d_i < 1$. Jika terdapat 3 dimensi dari inklusi keuangan yang dihitung, yaitu p untuk penetrasi, a untuk ketersediaan, dan u untuk penggunaan, maka perolehan suatu kabupaten/kota dari dimensi tersebut direpresentasikan dengan titik $X = (d_p, d_a, d_u)$ pada ruang 3 dimensi (Gambar 1). Dalam ruang 3 dimensi, titik $O = (0,0,0)$ menunjukkan titik kondisi inklusi keuangan yang buruk, sedangkan titik $W = (w_p, w_a, w_u)$ menunjukkan kondisi inklusi keuangan yang ideal dari setiap dimensi. Semakin jauh jarak antara titik O dengan titik X, semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan, semakin dekat jarak antara titik X dengan titik W, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan. Kedua jarak tersebut dinormalisasi dengan jarak antara W dan O agar nilainya antara 0 dan 1. Oleh karena itu, nilai indeks inklusi keuangan akan berada antara 0 dan 1. Jika jarak antara titik O dengan titik X dilambangkan dengan X_1 , yaitu:

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_p^2 + d_a^2 + d_u^2}}{\sqrt{w_p^2 + w_a^2 + w_u^2}} \dots \dots \dots (2)$$

Jarak antara titik X dengan titik W dilambangkan dengan X_2

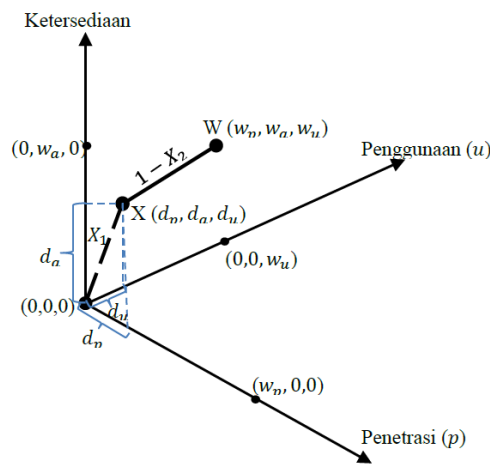
$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_p - d_p)^2 + (w_a - d_a)^2 + (w_u - d_u)^2}}{\sqrt{w_p^2 + w_a^2 + w_u^2}} \dots \dots \dots (3)$$

Setelah masing-masing indeks dari ketiga dimensi inklusi keuangan setiap kabupaten/kota dihitung, IKI dihitung dengan persamaan 4 sebagai berikut.

$$IKI = \frac{1}{2} [X_1 + X_2] \dots\dots\dots(4)$$

Nilai IKI=1 menunjukkan kabupaten/kota itu memiliki kondisi inklusi keuangan terbaik di antara kabupaten/kota yang lain. Sedangkan nilai IKI=0 menunjukkan kabupaten/kota tersebut memiliki kondisi inklusi keuangan paling buruk. Tingkat inklusi keuangan semakin baik jika nilai indeks inklusi keuangan mendekati 1. Dalam penelitian ini, nilai IKI akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Tingkat inklusi keuangan tinggi jika nilai indeks inklusi keuangan $0,6 < IKI \leq 1$, tingkat inklusi keuangan sedang jika nilai indeks inklusi keuangan $0,3 \leq IKI \leq 0,6$, dan tingkat inklusi keuangan rendah jika $IKI < 0,3$ (Sarma, 2012). Jika digambarkan ke dalam ruang tiga dimensi, maka IKI adalah sebagai berikut.

Grafik 1. Tiga Dimensi IKI



Sumber: Sarma, 2012

Hasil dan Pembahasan

Dari ketiga dimensi IKI, dimensi kegunaan memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu sebesar 0,47, disusul dimensi ketersediaan jasa keuangan dan penetrasi perbankan, masing-masing sebesar 0,34 dan 0,24. Setiap dimensi dalam pengukuran IKI memiliki bobot yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa penetrasi perbankan menjadi penyebab utama rendahnya IKI di kabupaten/kota Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian Wardhono, Indrawati, & Qori'ah (2016) inklusivitas keuangan yang rendah salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi keuangan masyarakat yang rendah, sehingga masyarakat tidak mengetahui produk-produk perbankan beserta manfaatnya. Selain itu dapat juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah sehingga masyarakat tidak memiliki uang yang dapat ditabung sehingga mereka enggan membuka rekening tabungan.

1. Penetrasi Perbankan

Dimensi penetrasi perbankan menggambarkan persentase penduduk dewasa yang memiliki minimal satu jenis rekening simpanan dan minimal satu jenis rekening pinjaman. Secara umum dimensi ini menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan, baik layanan simpanan maupun pinjaman. Untuk negara yang tidak memiliki data tersebut, dapat menggunakan jumlah rekening simpanan atau pinjaman per populasi penduduk dewasa. Jasa

keuangan semakin inklusif jika pengguna jasa perbankan semakin banyak. Penelitian ini menggunakan jumlah rekening DPK perbankan sebagai proksi dimensi penetrasi perbankan. Rata-rata nilai dimensi penetrasi perbankan kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 0,24, termasuk dalam kategori rendah. Dalam penelitian ini, masing-masing dimensi dibagi kedalam 3 kategori, yaitu tinggi ($0,6 < d_i \leq 1$), sedang ($0,3 \leq d_i \leq 6$) dan rendah ($d_i < 3$). Meskipun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki nilai dimensi penetrasi sedang dan tinggi. Kota Solok memiliki nilai dimensi penetrasi yang termasuk kategori tinggi, sedangkan Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh memiliki nilai dimensi penetrasi perbankan dalam kategori sedang. Kota Padang memiliki jumlah rekening deposit terbanyak dibanding kabupaten/kota lain, yaitu sebesar 2,15 juta akun. Tetapi karena jumlah penduduk dewasa juga besar maka nilai dimensi penetrasi menjadi sedang. Selain Kota Padang, Kota lain yang memiliki jumlah rekening deposit di atas 500 ribu adalah Kota Solok, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Kota-kota tersebut memiliki tingkat penetrasi perbankan yang lebih tinggi karena aktivitas perekonomian di kota tersebut juga tinggi.

Daerah berstatus kota cenderung memiliki luas wilayah yang lebih kecil daripada kabupaten sehingga akses masyarakat kemana-mana dekat, dan infrastruktur daerah kota lebih baik daripada kabupaten sehingga masyarakat mudah untuk menjangkau lembaga keuangan formal. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat kota cenderung lebih tinggi dari kabupaten, dimana sesuai dengan penelitian Vibriyanti (2014) dan Susilowati & Leonard (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor penentu kepemilikan tabungan rumah tangga. Jika pendidikan tinggi maka literasi keuangannya juga lebih tinggi, mereka lebih mengetahui produk-produk perbankan beserta manfaatnya sehingga kecenderungan membuka rekening bank juga lebih tinggi. Rendahnya akses layanan keuangan formal disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka (BI, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Sanjaya & Nursechafia (2016) aksesibilitas merupakan faktor penentu utama inklusivitas keuangan, dimana kelompok rumah tangga miskin merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

2. Ketersediaan Jasa Perbankan

Dimensi kedua yaitu ketersediaan jasa perbankan, dimana indikatornya adalah jumlah akses poin per penduduk dewasa. Akses poin merupakan tempat transaksi *cash in/cash out*, dapat berupa bank, ATM, dan agen bank. Penelitian ini menggunakan jumlah kantor cabang bank umum sebagai proksi dimensi ketersediaan jasa perbankan. Adanya kantor cabang perbankan yang terjangkau masyarakat luas menunjukkan penyebaran jasa perbankan. Semakin banyak jumlah kantor cabang perbankan, semakin tinggi inklusivitas keuangannya. Jumlah kantor cabang perbankan terbanyak di Sumatera Barat terdapat di Kota Padang (172 kantor), disusul Kota Bukittinggi (52 kantor), sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (7 kantor).

Tabel 2. Nilai Dimensi Penetrasi, Ketersediaan, dan Kegunaan Jasa Perbankan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2020

No	Kabupaten/Kota	Dimensi		
		Penetrasi	Ketersediaan	Kegunaan
1	Kab. Kep. Mentawai	0.06	0.19	0.14
2	Kab. Pesisir Selatan	0.12	0.18	0.50
3	Kab. Solok	0.02	0.06	0.21
4	Kab. Sijunjung	0.23	0.22	0.41
5	Kab. Tanah Datar	0.17	0.19	0.35
6	Kab. Padang Pariaman	0.04	0.20	0.23
7	Kab. Agam	0.12	0.15	0.20
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.08	0.15	0.19
9	Kab. Pasaman	0.22	0.29	0.47
10	Kab. Solok Selatan	0.16	0.21	0.72
11	Kab. Dharmasraya	0.12	0.24	0.36
12	Kab. Pasaman Barat	0.08	0.17	0.28
13	Kota Padang	0.32	0.42	0.74
14	Kota Solok	1.00	1.00	0.91
15	Kota Sawahlunto	0.25	0.48	0.45
16	Kota Padang Panjang	0.35	0.65	0.56
17	Kota Bukittinggi	0.59	0.96	1.00
18	Kota Payakumbuh	0.53	0.45	0.78
19	Kota Pariaman	0.17	0.24	0.41
Rata-Rata		0.24	0.34	0.47

Sumber: BI dan BPS, 2020 (data diolah)

Rata-rata nilai dimensi ketersediaan jasa perbankan di Sumatera Barat sebesar 0,34, termasuk dalam kategori sedang. Tetapi seperti halnya dengan dimensi penetrasi perbankan, Kota Solok memiliki dimensi ketersediaan jasa perbankan yang termasuk dalam kategori tinggi. Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Sawahlunto dan Payakumbuh memiliki nilai dimensi ketersediaan jasa perbankan kategori sedang, dan kabupaten lainnya masuk dalam kategori rendah. Jumlah kantor cabang perbankan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 41 kantor, lebih banyak dari jumlah kantor cabang perbankan yang ada di Kota Solok (32 kantor), tetapi karena jumlah penduduk dewasa di Kabupaten Pesisir Selatan lebih banyak dari pada Kota Solok, menyebabkan nilai dimensi ketersediaan jasa perbankan di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi rendah.

Jumlah penduduk dewasa yang semakin besar membutuhkan kantor cabang perbankan yang lebih banyak juga, agar dapat memberikan pelayanan keuangan yang memadai. Seperti pada dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan di kota lebih tinggi daripada kabupaten. Jumlah kantor cabang bank di kota lebih banyak daripada kabupaten karena kota memiliki potensi permintaan pangsa pasar layanan keuangan yang lebih besar sehubungan dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Pendirian kantor cabang bank dan kantor cabang pembantu mempertimbangkan aspek jumlah dana yang dihimpun, kredit yang telah disalurkan, dll. Sehingga jika jumlah dana yang dihimpun maupun kredit yang

disalurkan besar maka peluang pendirian kantor cabang maupun kantor cabang pembantu juga besar, hal tersebut akan meningkatkan nilai dimensi ketersediaan jasa perbankan.

3. Kegunaan Jasa Perbankan

Kepemilikan rekening perbankan, baik simpanan maupun pinjaman saja belum dapat digunakan untuk menggambarkan inklusifitas keuangan. Manfaat dari keberadaan jasa keuangan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada kenyataannya, penduduk dewasa yang memiliki akses terhadap layanan keuangan belum tentu menggunakan jasa tersebut karena alasan tertentu, misalnya kesulitan transportasi akibat tinggal di daerah terpencil, jarak kantor bank yang jauh, produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan, dan lain-lain. Dengan demikian perlu memasukkan dimensi kegunaan jasa perbankan dalam mengukur indeks inklusi keuangan. Penelitian ini menggunakan rasio jumlah tabungan dan kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap PDRB dalam mengukur dimensi kegunaan jasa perbankan, karena simpanan dan pinjaman merupakan layanan dasar perbankan.

Untuk dimensi ini, rata-rata nilainya lebih tinggi dari dua dimensi sebelumnya, yaitu sebesar 0,47, termasuk dalam kategori sedang. Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki nilai dimensi kegunaan jasa perbankan termasuk dalam kategori tinggi yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Sedangkan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sedang antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Padang Panjang, dan Pariaman. Kabupaten/kota selain itu masuk dalam kategori rendah. Kegunaan jasa perbankan menggambarkan nilai simpanan yang dihimpun perbankan baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito berjangka, dan kredit yang disalurkan perbankan dalam suatu kabupaten/kota dalam proporsinya terhadap PDRB. Semakin besar proporsi simpanan dan kredit terhadap PDRB semakin besar pula nilai dimensi kegunaan jasa perbankan. Kota Bukittinggi memiliki nilai dimensi kegunaan jasa perbankan terbesar diantara kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Jumlah DPK di Bukittinggi sebesar 4,6 triliun Rupiah, sedangkan jumlah kredit sebesar 3,3 triliun Rupiah, dengan PDRB sebesar 8,6 triliun Rupiah, menyebabkan nilai dimensi kegunaan jasa perbankan menjadi tinggi.

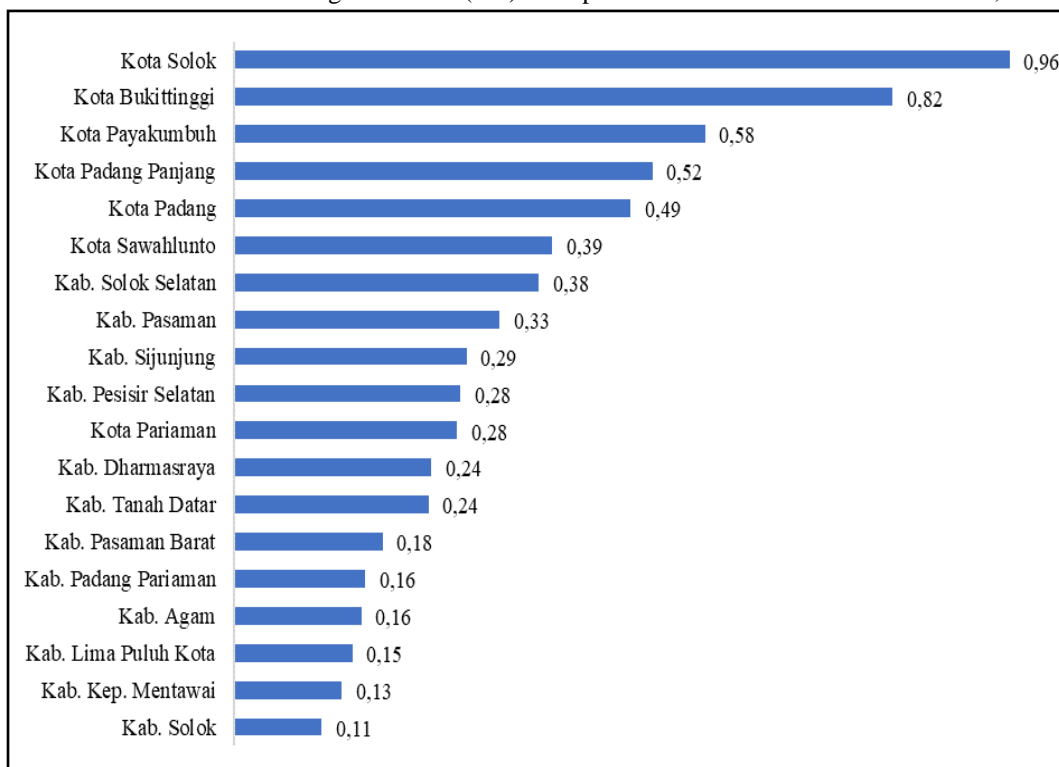
4. Indeks Keuangan Inklusif antar Kabupaten/Kota

Ketiga dimensi di atas merupakan komponen yang digunakan dalam pengukuran IKI, sehingga semakin besar nilai masing-masing dimensi, semakin besar pula IKI yang dicapai suatu kabupaten/kota. Hasil pengukuran indeks keuangan inklusif antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kota yang memiliki IKI tinggi yaitu Kota Solok dan Bukittinggi, 6 (enam) kabupaten/kota yang memiliki IKI sedang yaitu Kota Payakumbuh, Padang Panjang, Padang, Sawahlunto, dan Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman, dan 11 kabupaten lainnya memiliki IKI kategori rendah. Rata-rata IKI kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 0,35, termasuk dalam kategori sedang. Tingkat inklusi keuangan yang rendah dapat disebabkan oleh banyaknya penduduk yang tidak dapat mengakses layanan perbankan. Selain itu bisa juga karena produk keuangan perbankan belum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara umum tingkat inklusifitas keuangan di daerah yang berstatus kota lebih tinggi dari pada kabupaten. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ngasuko (2018) dimana kepala rumah

tangga yang tinggal di daerah pedesaan memiliki peluang 0,73 kali lebih kecil untuk membuka rekening tabungan daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Tingginya tingkat inklusifitas tersebut disebabkan karena nilai masing-masing dimensi penyusun IKI di daerah yang berstatus kota juga lebih tinggi. Di daerah berstatus kota masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan. Biasanya daerah berstatus kota memiliki wilayah yang relatif lebih kecil dari pada kabupaten dan juga tidak adanya daerah terpencil, sehingga seluruh wilayah dapat terjangkau oleh kantor bank. Selain itu penduduk di daerah yang berstatus kota penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pada daerah berstatus kabupaten. Penduduk dengan pendidikan lebih tinggi akan memiliki tingkat pemahaman keuangan (literasi) yang lebih tinggi pula. Semakin banyak penduduk yang sadar terkait produk dari jasa keuangan, maka akan semakin meningkat pula transaksi keuangannya. Peningkatan transaksi keuangan inilah yang merupakan salah satu penyebab tingginya inklusifitas keuangan, baik dari sisi kepemilikan rekening, dana yang disimpan, maupun kredit yang disalurkan. Selain itu, tingkat aktivitas perekonomian kota juga cenderung lebih tinggi daripada kabupaten. Dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi, kebutuhan akan pembiayaan yang dapat membiayai aktivitas tersebut juga lebih tinggi, sehingga meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan perbankan.

Grafik 2. Nilai Indeks Keuangan Inklusif (IKI) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020



Sumber: BI dan BPS, 2020 (data diolah)

Kota Solok memiliki IKI tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, sebesar 0,96, disusul oleh Kota Bukittinggi dan Payakumbuh, masing-masing sebesar 0,82 dan 0,58. Jumlah DPK yang dihimpun perbankan di wilayah Kota Solok sebesar 1,96 triliun Rupiah, dengan kredit sebesar 1,44 triliun Rupiah, sedangkan PDRB nya sebesar 4,04 triliun Rupiah. Sehingga rasio DPK ditambah kredit terhadap PDRB nya besar, mengakibatkan nilai dimensi

kegunaan jasa perbankan menjadi besar pula. Selain itu jumlah rekening deposit dan kantor bank di Kota Solok juga relatif lebih banyak, tetapi jumlah penduduk dewasa kecil, sehingga nilai dimensi penetrasi dan ketersediaan jasa perbankan juga besar. Ketiga dimensi tersebut membentuk IKI, karena ketiganya bernilai lebih besar dari kabupaten/kota lain, secara otomatis nilai IKI Kota Solok menjadi tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya.

Sebaliknya untuk Kabupaten Solok, jumlah DPK dan kredit masing-masing sebesar 0,23 dan 2,34 triliun Rupiah, sedangkan PDRB nya sebesar 13,51 triliun Rupiah. Dengan demikian proporsi layanan keuangan terhadap PDRB nya kecil, dan menyebabkan nilai dimensi kegunaan jasa perbankan juga kecil. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat Kabupaten Solok belum memanfaatkan produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh perbankan secara optimal. Jumlah rekening deposit perbankan wilayah Kabupaten Solok adalah yang terkecil kedua di Sumatera Barat, sebanyak 57 ribu akun. Kabupaten dengan jumlah rekening deposit terkecil di Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebanyak 38 ribu akun. Dimensi penetrasi dan ketersediaan jasa perbankan Kabupaten Solok juga kecil karena jumlah rekening perbankan dan jumlah kantor cabang perbankan kecil tetapi jumlah penduduk dewasa besar. Hal tersebut menyebabkan IKI Kabupaten Solok menjadi terkecil diantara kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dimensi kegunaan memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibanding kedua dimensi lainnya yaitu sebesar 0,47, termasuk dalam kategori sedang, disusul dimensi ketersediaan jasa keuangan dan penetrasi perbankan, masing-masing sebesar 0,34 (kategori sedang) dan 0,24 (kategori rendah). Karena masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama, penetrasi perbankan menjadi penyebab utama rendahnya IKI di kabupaten/kota Sumatera Barat. Rata-rata IKI kabupaten/kota di Sumatera Barat sebesar 0,35, termasuk dalam kategori sedang. Meskipun masuk kategori sedang, rata-rata IKI tersebut hanya 0,5 poin di atas batas bawah kategori sedang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Sumatera Barat belum dapat mengakses layanan keuangan formal secara optimal.

Terdapat 2 (dua) kota yang memiliki IKI tinggi yaitu Kota Solok dan Bukittinggi, enam kabupaten/kota yang memiliki IKI sedang yaitu Kota Payakumbuh, Padang Panjang, Padang, Sawahlunto, dan Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman, dan 11 kabupaten lainnya memiliki IKI kategori rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah berstatus kota cenderung memiliki IKI yang lebih tinggi dari pada wilayah berstatus kabupaten. Wilayah kota memiliki luas yang lebih besar dari pada kabupaten serta infrastruktur yang lebih lengkap dan banyak dibanding kabupaten sehingga akses masyarakat ke lembaga keuangan formal lebih mudah. Selain itu, tingkat pendidikan juga merupakan penentu inklusivitas keuangan suatu daerah, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat inklusivitas keuangan. Tingkat pendidikan masyarakat kota biasanya lebih tinggi dari pada kabupaten, sehingga tingkat literasi keuangan juga lebih tinggi sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan inklusivitas keuangan. Rekomendasi pada penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penetrasi perbankan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman terkait jasa perbankan dengan melakukan edukasi jasa keuangan terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan penduduk daerah tertinggal, sehingga pemahaman tentang

- manfaat dan risiko, hak dan kewajiban serta keyakinan masyarakat bahwa produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat meningkat, agar mereka dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, dan mereka tertarik untuk membuka rekening tabungan maupun mendapatkan pelayanan keuangan lain dari perbankan. Selain itu juga diperlukan peningkatan infrastruktur fisik misalnya pembangunan infrastruktur internet sampai ke nagari dan jorong terpencil, perbaikan dan pembangunan jalan, agar jasa keuangan dapat menjangkau seluruh masyarakat.
2. Ketersediaan jasa keuangan dapat ditingkatkan melalui penerapan layanan perbankan tanpa kantor (*branchless banking*) atau Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD). *Branchless banking* merupakan inovasi perbankan dalam menjangkau layanan jasa keuangannya kepada nasabah tanpa melalui kantor fisik bank melainkan hanya memanfaatkan jasa agen atau teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga layanan jasa keuangan perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Contoh layanan *branchless banking* adalah *mobile banking*, *internet banking*, *electronic money*, *mobile money*, ATM, dll. Pengerahan agen Laku Pandai diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan jasa keuangan. Agen Laku Pandai bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. LKD adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau *web* melalui pihak ketiga sehingga masyarakat dapat melakukan belanja atau transaksi *online* dengan mudah, dapat melakukan transfer tanpa perlu datang ke kantor fisik untuk melakukan transaksi.
 3. Kegunaan jasa perbankan dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan peran kantor cabang bank, peningkatan pendapatan, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
 4. Sektor perbankan perlu memberikan sosialisasi sampai ke daerah terpencil mengenai produk-produknya. Belum adanya internet di daerah tersebut menyebabkan minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait produk perbankan yang sudah disosialisasikan perbankan melalui *website* resmi maupun sosial media. Untuk itu, agen bank yang berlokasi di daerah selain memberikan layanan perbankan juga diharapkan memberikan sosialisasi secara langsung atau memberikan booklet-booklet produk perbankan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang sebelumnya *less literate* maupun *not literate* menjadi *well literate*, serta meningkatkan jumlah pengguna layanan perbankan yang akan meningkatkan nilai dimensi penetrasi dan ketersediaan jasa perbankan.
 5. Pemerintah daerah meningkatkan pembangunan infrastruktur internet yang dapat menjangkau daerah terpencil, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan *mobile banking*, *online banking*, maupun *digital banking* yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan secara mandiri. Layanan perbankan mandiri tersebut memudahkan nasabah dalam bertransaksi keuangan karena tidak terikat waktu dan tidak perlu datang ke kantor bank, dengan adanya kemudahan tersebut maka transaksi keuangan akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan nilai dimensi kegunaan jasa perbankan.
 6. Untuk evaluasi yang lebih mendalam diperlukan penelitian mengenai penentu akses layanan keuangan formal di masing-masing kabupaten/kota, karena setiap kabupaten/kota

memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga strategi kebijakan untuk meningkatkan inklusifitas keuangan juga berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPS Provinsi Sumatera Barat yang telah merilis publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021 dan kepada Bank Indonesia yang telah merilis publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, Provinsi Sumatera Barat periode Desember 2020.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

Referensi

- Adriani, D., & Wiksuana, I., G. (2018). Inklusi Keuangan dalam Hubungannya dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(12):6420–44.
- Atikah, & Ma'ruf, A. (2016). Analisis Keuangan Inklusif: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17(1):31–45.
- Azwar. (2017). Analisis Empiris Inklusifitas Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan* 10(1):1–21.
- Bank Indonesia. (2014). Booklet Keuangan Inklusif. *Departemen Akses Pengembangan Keuangan dan UMKM*.
- BPS Provinsi Sumatera Barat. (2021). Sumatera Barat Dalam Angka 2021. *BPS Provinsi Sumatera Barat*.
- Cámara, N., & Tuesta, D. (2014). Measuring Financial Inclusion: A Multidimensional Index. *Working Paper* 14(26).
- Kunt, D., A., Klapper, L., & Singer, D. (2017). Financial Inclusion and Inclusive Growth, A Review of Recent Empirical Evidence. *Policy Research Working Paper* 8040.
- Ngasuko, T. A. (2018). Determinant Factor for Household to Access Formal Financial Institution: The Study Case Susenas 2015. *Jurnal Inovasi* 15(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Siaran Pers. Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Piñeyro, C. M. Z. (2013). Financial Inclusion Index: Proposal of A Multidimensional Measure for Mexico. *Revista Mexicana de Econom'ia y Finanzas* 2:157–80.
- Sanjaya, I. M., & Nursechafia. (2016). Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Cross-Province Analysis in Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking* 18(3):281–306.
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development* 7.
- Susilowati, E., & Leonard. (2019). Factors Influence Financial Inclusion: Evidence from Indonesian Micro Data. *Etikonomi* 8(1):121–32.
- Ummah, B.B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2014). Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 4(1):1–27.
- Vibriyanti, D. (2014). The Effect of Socio-Demographic Variables on Household Saving in Indonesia (The Analysis of the 2007 IFLs Data). *Developing Country Studies* 4(1):73–84.

- Wardhono, A., Indrawati Y., & Qori'ah, C., G. (2016). The Determinants of Financial Inclusion: Evidence from Indonesian Districts. *International Journal of Economic Perspectives* 10(4):472–83.
- Zins, A., & Weill, L. (2016). The Determinants of Financial Inclusion in Africa. *Review of Development Finance* 6:46–57.